

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

**Khoirul Ifa**

Email: [khoirul\\_ifa@yahoo.co.id](mailto:khoirul_ifa@yahoo.co.id)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

**Abstract.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur yaitu 38 kabupaten / kota. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t dan F) dan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Hasil analisis data diketahui pengujian hipotesis 1 secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis 2 menunjukkan secara parsial variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis 3 menunjukkan secara parsial variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis 4 menunjukkan secara parsial variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis 5 menunjukkan secara simultan PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**Keywords:** *pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dan belanja modal*

### PENDAHULUAN

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan setiap daerah dapat menggali potensi daerahnya sehingga mampu berdaya saing serta mampu mensejahterakan masyarakat. Selain itu otonomi daerah hendaknya harus mampu menciptakan pelayanan umum bagi masyarakat secara utuh dari lembaga pemerintah masing-masing daerah sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan sesuai prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang nyata adalah suatu prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal keuangan. Adapun sumber keuangan pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dalam hal ini sumber keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan belanja modal pemerintah.

Sebelumnya penelitian Mawarni (2013) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada kabupaten dan kota di aceh) Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Arwati dan Hadiati (2013) tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) tentang pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Perbedaan penelitian Tuasikal (2008) dengan penelitian ini terletak pada variabel terikatnya menggunakan DAU, DAK, PAD, PDRB dan variabel bebasnya menggunakan belanja modal pemerintah sedangkan penelitian ini menggunakan variabel terikat PAD, DAU, DAK, SiLPA dan variabel bebasnya menggunakan belanja modal. Sebelumnya masih sedikit penelitian yang menggunakan SiLPA sebagai variabel dependen.

### TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur

### LANDASAN TEORI

#### Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menyangkut 2 aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya yang terdiri dari :

Analisis penerimaan yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber- sumber pendapatan yang potensial dan biaya- biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.

Analisis pengeluaran yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya- biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.

#### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

#### Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut peraturan pemerintah No104 Tahun 2000 dana alokasi umum adalah danayang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Saragih (2003 : 104) bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan DAU adalah untuk meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Yani, 2002 : 142). Jadi DAU merupakan sumber penerimaan yang penting bagi suatu daerah, adanya kontrol pemerintah dalam mengelola segala sumber penerimaan APBN termasuk DAU merupakan respon yang baik dalam mengelola keuangan daerah sehingga potensi daerah akan terus berkembang.

#### Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Yani (2002:166) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya

dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dimana daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Dana alokasi khusus digunakan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana fisik pelayanan masyarakat yang umur ekonomisnya panjang sebagai contoh dana alokasi khusus bidang kesehatan dan pendidikan meliputi :

Rehabilitasi gedung sekolah

Pembangunan puskesmas/pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang masih kurang sarana kesehatan

Peningkatan mutu pendidikan dengan memperbanyak prasarana buku di perpustakaan

Pembangunan/rehabilitasi sarana sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC

#### **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 menyatakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak ketiga yang belum terselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah Sedangkan menurut PP Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Jadi jelas SiLPA merupakan sisa lebih/kurang dari semua pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan selanjutnya digunakan mendanai kegiatan-kegiatan yang belum terselesaikan periode sebelumnya.

Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 137 menyatakan: Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;

mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

Kemudian Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai pengganti Permendagri 13 Tahun 2006 menyatakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan

penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

#### **Belanja Modal Pemerintah**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

#### **Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pemerintah**

Menurut Mardiasmo (2004), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah

Sedangkan Arwati dan Hadiati (2013) menjelaskan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik

Menurut Widjaja dalam Ferdian (2013) tranfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD. Danaperimbangan bersumber dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Sugiarthi dan Supadmi (2014) menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Hal tersebut menandakan hubungan antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah adalah penting, mengingat relevansinya bagi kebijakan terutama berkenaan dengan defisit anggaran.

#### **Hipotesis**

- H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur
- H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur
- H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur
- H4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur
- H5 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pengaruh atau kausalitas antar variabel. menurut Nur (1999:27) penelitian kausalitas merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatori (explanatory research) dimana penelitian eksplanatori merupakan jenis penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara satu variabel dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis.

**Populasi dan Teknik Sampel**

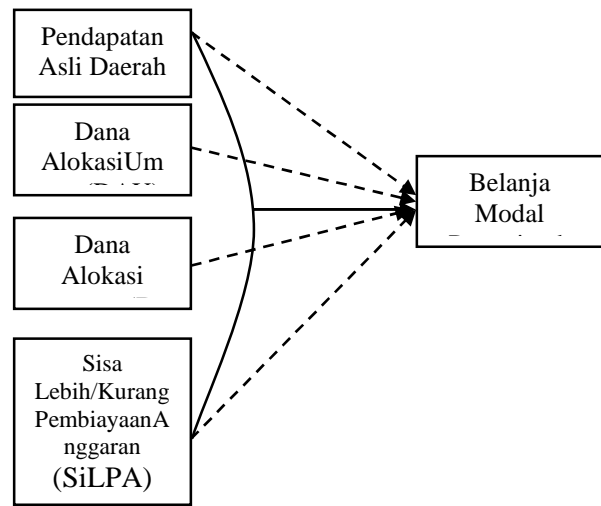
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Jawa Timur yaitu 38 kabupaten / kota.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Azwar (2001 :91) Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data yang di gunakan meliputi : PAD, DAU, DAK, SiLPA dan Belanja Modal Pemerintah. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data anggaran tahun 2010-2015. Sumber data di peroleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Model Penelitian**

**Gambar 1  
Model Penelitian**



Sumber data : diolah

**Teknik Analisis Data**

**Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik merupakan pengujian statistik yang bertujuan menguji sejauh mana data memenuhi asumsi klasik, beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Pengujian regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) (Kuncoro, 2007:77)

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Y : Variabel dependen (Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur)

a : Konstanta

b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub>,b<sub>4</sub> : Koefisien regresi

X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>,X<sub>3</sub>,X<sub>4</sub> : Variabel independen

(PAD, DAU, DAK, SiLPA)

e : Error

**Pengujian Hipotesis**

**Uji t ( Parsial)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian parsial digunakan uji t. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat kepercayaan 5%. Pengujian ini menggunakan kriteria Ho: =0 artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ho: 0 artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung lebih kecil t tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak.Dan sebaliknya, jika t hitung lebih besar t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima (Ghozali, 2009).

**Uji F (Simultan)**

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Uji F dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan level of significant 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai (R<sup>2</sup>) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

**Tabel 1**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	228	25217.00	3520137	196645.9	413272.37952
X2	228	223964.00	1613162	740818.4	278738.31376
X3	228	4241.00	157274.00	58941.11	25310.24179
X4	228	361.00	1234414	109226.2	142287.98313
Y	228	28974.00	2131478	275750.1	272044.92711
Valid N (listwise)	228				

Sumber : Output SPSS, Diolah

Hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampel N sebanyak 228, dengan rata-rata jumlah PAD (X1) pemerintah kabupaten dan kota di provinsi jawa timur sebesar19,6 Milyar Rupiah dengan jumlah PAD terendah 2,5 Milyar Rupiah dan PAD tertinggi Rp 3,5 Triliyun Rupiah sedangkanstandar deviasi 41,3 Milyar Rupiah dari rata-rata. PAD merupakan sumber penerimaan penting bagi pemerintah daerah, dalam jangka panjang akan mempengaruhi besarnya penerimaan daerah.

Berdasarkan tabel 1 diatas rata-rata jumlah DAU (X2) sebesar 74,08 Milyar Rupiah dengan jumlah DAU terendah dan tertinggi masing-masing sebesar 22,3 Milyar Rupiah dan 1,6 Triliyun Rupiahsedangkan standar deviasi sebesar 27,8 Milyar Rupiah dari rata-rata. Berdasarkan tabel 1 diatas rata-rata jumlah DAK (X3) sebanyak 5,8 Milyar Rupiah, sedangkan jumlah DAK terendah sebesar 4,2 Juta Rupiah dan DAK tertinggi sebesar 15,7 Milyar Rupiah dengan standar deviasi sebesar 5,8 Milyar Rupiah. Hasil uji statistik deskritif pada tabel 1 diatas terlihat rata-rata jumlah SiLPA 14,2 Milyar Rupiah, nilai SiLPA terendah sebesar 3,6 Juta Rupiah dan nilai SiLPA tertinggi sebesar 1,2Triliyun Rupiah dengan nilai standar deviasi sebesar 14,2 Milyar Rupiah diatas rata-rata.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah guna menambah aset kekayaan daerah, belanja modal digunakan oleh pemerintah daerah diantaranya untuk pembangunan sarana transpostasi, sanitasi, pendidikan, kesehatan dll. Rata-rata nilai belanja modal (Y) sebesar 27,5 Milyar Rupiah dengan jumlah belanja modal

terendah sebesar 2,8 Milyar rupiah dan jumlah modal tertinggi sebesar 2,1 Trilyun Rupiah dengan standar deviasi 27,2 Milyar Rupiah.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**  
**Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal, dalam penelitian ini uji normalitas data di uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z yakni melihat nilai probabilitas pada Unstandardized Residual > 0,05 artinya data berdistribusi normal.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		228
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	75900.61042
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		1.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.201

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS, Diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas hasil pengujian normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Z diketahui bahwa nilai probabilitas (p) pada Unstandardized Residual (0,201 > 0,05) artinya dalam penelitian ini data berdistribusi normal.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Deteksi multikolinearitas dapat diketahui jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai batas tolerance kurang dari 0,10 artinya terjadi multikolinearitas dan sebaliknya jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai batas tolerance lebih besar dari 0,10 maka data dalam penelitian terbebas dari multikolinearitas. Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0,319	3,133
X2	0,516	1,937
X3	0,574	1,742
X4	0,331	3,020

Sumber : Output SPSS, Diolah

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) dan SiLPA (X4) mempunyai angka VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 artinya dalam penelitian terbebas dari multikolinearitas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan uji park yaitu membuat logaritma natural pada variabel dependen maupun independen, jika nilai t hitung < t tabel atau nilai sig (probabilitas) > 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji park :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.690	5.106		3.856	.000
	LnX1	.413	.229	.169	1.804	.073
	LnX2	-.869	.660	-.162	-1.316	.190
	LnX3	.536	.368	.140	1.455	.147
	LnX4	.209	.147	.106	1.423	.156

a. Dependent Variable: Lnei2

Sumber : Output SPSS, Diolah

Hasil uji park pada Tabel 4 menunjukkan nilai t hitung masing-masing variabel < t tabel yakni (1,804, -1,316, 1,455, 1,423) < 2,0280 maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai sig (probabilitas) masing-masing variabel (0,073, 0,190, 0,147, 0,156) > 0,05) maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Autokorelasi**

Deteksi autokorelasi dapat di uji menggunakan Durbin-Watson test, yaitu menguji apakah terdapat korelasi parsial atau tidak dalam suatu data penelitian. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.960 <sup>a</sup>	.922	.921	76578.30789	1.636

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS, Diolah

Berdasarkan Tabel 5 nilai Durbin Watson test 1,609 dengan jumlah unit analisis sebesar 228 dan jumlah variabel bebas 4, nilai dL dan dU diketahui 1,7279 dan 1,8094, maka nilai Durbin Watson test 1,636 berada diantara -2 sampai +2 dan dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi.

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-25408,3	15238,856		-1,662	,099					
X1	,394	,022	,589	18,098	,000	,918	,771	,338	,319	3,133
X2	,210	,025	,215	8,271	,000	,523	,485	,155	,516	1,937
X3	,084	,265	,009	,355	,723	,272	,024	,007	,574	1,742
X4	,573	,062	,300	9,236	,000	,858	,526	,173	,331	3,020

a. Dependent Variable: Y

Tabel 6 diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$BM = -25408,3 + 0,394 PAD + 0,210 DAU + 0,094 DAK + 0,573 SiLPA + e$$

Model regresi tersebut memiliki makna :

Nilai konstanta sebesar-25408,3artinya, apabila nilai variabel PAD, DAU, DAK, dan SiLPA bernilai 0 maka belanja modal akan semakin berkurang sebesar 25,4 Milyar Rupiah

Variabel PAD berpola positif sehingga semakin bertambah PAD maka semakin tinggi pula belanja modal. Nilai koefisien sebesar 0,394 artinya setiap pertambahan Rp 10.000 variabel PAD akan menaikkan belanja modal sebesar Rp 3940 dengan asumsi variabel DAU, DAK, dan SiLPA konstan (tetap)

Variabel DAU berpola positif sehingga semakin bertambah DAU maka semakin tinggi pula belanja modal. Nilai koefisien sebesar 0,210 artinya setiap pertambahan Rp 10.000 variabel DAU akan menaikkan belanja modal sebesar Rp 2100 dengan asumsi variabel PAD, DAK dan SiLPA konstan (tetap)

Variabel DAK berpola positif sehingga semakin bertambah DAK maka semakin tinggi pula belanja modal. Nilai koefisien sebesar 0,094 artinya setiap pertambahan Rp 1000 variabel DAK akan menaikkan belanja modal sebesar Rp 940 dengan asumsi variabel PAD, DAU, dan SiLPA konstan (tetap)

Variabel SiLPA berpola positif sehingga semakin bertambah SiLPA maka semakin tinggi pula belanja modal. Nilai koefisien sebesar 0,573 artinya setiap pertambahan Rp 10.000 variabel SiLPA akan menaikkan belanja modal sebesar Rp 5730 dengan asumsi variabel PAD, DAU, dan DAK konstan (tetap)

**Hasil Pengujian Hipotesis**

**Hasil Uji t ( Parsial)**

1. Hasil uji t hipotesis 1 diketahui nilai t hitung 18,098> t tabel 1,9719 dan tingkat probabilitas 0,000 < 0,05, karena t hitung lebih besar dari t tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima, dapat disimpulkan secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
2. Hasil uji t hipotesis 2 diketahui nilai t hitung 8,271> t tabel 1,9719 dan tingkat probabilitas 0,000< 0,05, karena t hitung lebih kecil dari t tabel dan probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima dan H1 ditolak, dapat disimpulkan secara parsial variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
3. Hasil uji t hipotesis 3 diketahui nilai t hitung 0,355< t tabel 1,9719 dan tingkat probabilitas 0,723> 0,05, karena t hitung lebih kecil dari t tabel dan probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima dan H1 ditolak, dapat disimpulkan secara parsial variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
4. Hasil uji t hipotesis 4 diketahui nilai t hitung 9,236> t tabel 1,9719 dan tingkat probabilitas 0,000 < 0,05, karena t hitung lebih besar dari t tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima, dapat disimpulkan secara parsial variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

**Hasil Uji F (Simultan)**

**Tabel 7**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.5E+013	4	3.873E+012	660.452	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.3E+012	223	5864237240		
	Total	1.7E+013	227			

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS, Diolah

Hasil Uji statistik F pada Tabel 7 diatas untuk menguji pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap Belanja Modal, nilai F-hitung sebesar 660,452 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ( = 0,05) dan F-hitung sebesar 660,452 > F-tabel sebesar 2,41 yang artinya H5 diterima maka dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**Hasil Koefisien Determinasi (R2)**

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi (R2) sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,960(a)	,922	,921	76578,30789

a Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber : Output SPSS, Diolah

Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,922. Hal ini berarti 92% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan SiLPA, sedangkan 8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai probabilitas PAD 0,000 < 0,05 maka dapat

disimpulkan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini mendukung Hipotesis 1 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian sesuai dengan temuan Tuasikal (2008) bahwa PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal, artinya PAD memiliki kontribusi besar terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Mardiasmo (2004), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Sementara menurut PP Nomer 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, artinya setiap belanja pemerintah daerah harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dalam hal ini PAD. Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan pemerintah dengan meningkatkan belanja modal sehingga akan menaikkan PAD.

**Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai probabilitas 0,000 > 0,05 maka dapat disimpulkan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini sesuai dengan Hipotesis 2 yang menyatakan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur, namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi umum secara statistik tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, berbeda dengan penelitian Mawarni, dkk (2013) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Menurut Saragih (2003 : 104) bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tidak adanya pengaruh DAU terhadap Belanja Modal mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tidak digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Sedangkan DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui



penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Yani, 2002 : 142), karena DAU bertujuan mengurangi ketimpangan antar daerah, maka tidak adanya pengaruh DAU terhadap Belanja Modal menegaskan bahwa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sudah lebih mandiri sehingga tidak tergantung DAU dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal.

#### **Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $0,355 > 0,05$ , dapat disimpulkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini tidak mendukung Hipotesis 3 yang menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian Tuasikal (2008) yang menyatakan DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut Yani (2002:166) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki Dana Alokasi Khusus yang berbeda satu sama lain, transfer antara pemerintah pusat ke daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional, hal ini menunjukkan untuk membiayai belanja modal, pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur menggunakan sumber pembiayaan lain dan tidak tergantung pada pemerintah pusat.

#### **Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$  yang artinya SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini mendukung Hipotesis 4 yang menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur, penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) juga menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal.

Menurut Sugiardi dan Supadmi (2014) menyatakan hubungan antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah adalah

penting, mengingat relevansinya bagi kebijakan terutama berkenaan dengan defisit anggaran. Kenaikan SiLPA akan meningkatkan belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, SiLPA dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran maupun melanjutkan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### **Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA terhadap Belanja Modal**

Hasil uji statistik F (simultan) PAD, DAU, DAK dan SiLPA terhadap Belanja Modal menunjukkan nilai signifikansi  $0,000 < 5\%$  ( $= 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini mendukung Hipotesis 5 yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur, sejalan dengan penelitian Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa DAU dan DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan demikian jika PAD, DAU, DAK dan SiLPA meningkat maka Belanja Modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur akan meningkat guna meningkatkan pelayanan publik.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya PAD memiliki kontribusi besar terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Secara parsial variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur masih tergantung

- DAU dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal.
- Secara parsial variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur menggunakan sumber pembiayaan lain selain DAK dan tidak tergantung pada pemerintah pusat.
  - Secara parsial variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya kenaikan SiLPA akan meningkatkan belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
  - Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya jika PAD, DAU, DAK dan SiLPA meningkat maka Belanja Modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur akan meningkat.

#### Saran

- Pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik. Pengalokasian belanja modal pemerintah daerah tidak hanya diprioritaskan pada peningkatan PAD tapi juga harus diprioritaskan pada peningkatan DAU, DAK dan SiLPA maupun sumber pendapatan daerah lain sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah sensus dan tahun yang digunakan agar hasil penelitian lebih representatif terhadap populasi yang dipilih
- Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain baik dari APBD, PDRB, maupun variabel makro lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arwati Dini dan Hadiati Novita. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat". *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (Semantik 2013)*, ISBN: 979-26-0266-6.

- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar Offset : Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian provinsi jawa timur. *Data Anggaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015*. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Diakses pada 16 Mei 2016
- Ferdian, Yuriko. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah". *Tesis*. Universitas Negeri Padang
- Ghozali.Imam.2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Gema Pertama : Jakarta.
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Kuantitatif. Unit Penerbit dan Percetakan*.(UPP) STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mawarni. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2, No.2.
- Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonomi*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Supadmi, Ni Luh. 2014. "Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi". *E-Jurnal Akuntansi*

*Universitas Udayana, Vol 7 No 2  
Tahun 2014 Hal 477-495 ISSN: 2302-  
8556.*

Tuasikal, Askam. 2008. "Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 2. Juli 2008 Hal.142-155.

*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.*

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.